



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2022**

PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312):
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03)
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08) .
13. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 29);

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2022, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- (2) Sistematika Renja Perangkat Daerah 2021 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan Penutup.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan memperhatikan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Tahun 2022 yang berisi uraian tentang kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- Daerah Provinsi Gorontalo paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana termuat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Juli 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

DARDA DARABA



KATA PENGANTAR

RENJA Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi Perencanaan pembangunan daerah selama 2017-2022 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo

Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2022. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2017-2022.

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Semoga Rencana Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan, dapat memberikan masukan bagi penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gorontalo, Juni 2021

KEPALA BADAN,

BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19740311 199303 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 3

 1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan 6

 Capaian Renstra OPD

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 7

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 7

 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 12

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 15

 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 15

 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 20

 3.3. Program dan Kegiatan 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PERANGKAT DAERAH 25

BAB IV PENUTUP 29

LAMPIRAN :

Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD dan Pencapaian RENSTRA OPD sampai dengan Tahun 2021

Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo

Tabel T-C.31 : Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022

Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2023



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Bay Pass, Kel. Tamalate Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8852266 – email : bappedagtloprov@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 32.B TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu terarah perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2025 Provinsi Gorontalo;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017;
- h. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, BAPPEDA Provinsi Gorontalo sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ;

KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada butir pertama Diktum KESATU, untuk :

1. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022;
2. Menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 berdasarkan Surat Edaran Gubernur Gorontalo tentang penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022;
4. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Gorontalo.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 3 Maret 2021

KEPALA BADAN,


BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19740311 199301 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Gorontalo
Nomor : 32.B Tahun 2021
Tanggal : 3 Maret 2021

Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja)
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Susunan	Nama Jabatan	Ket.
1.	Penanggung Jawab	Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo	
2.	Ketua	Sekretaris BAPPEDA Provinsi Gorontalo	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan2. Kabid Ekonomi3. Kabid Sosial Budaya4. Kabid Prasarana Wilayah5. Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan6. Kabid Penelitian Dan Pengembangan7. Kasubag Perencanaan & Evaluasi8. Kasubbag Umum & Kepegawaian9. Kasubid Pertanian dan Pangan10. Kasubid Kelautan, Perikanan dan Pariwisata11. Kasubid Dunia Usaha, Industri dan ESDM12. Kasubid Pendidikan, Pemuda, Agama dan Kebudayaan13. Kasubid. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial14. Kasubid. Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental15. Kasubid Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan16. Kasubid Prasarana Keciaptakaryaan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman17. Kasubid Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan18. Kasubid Perencanaan Pembangunan19. Kasubid Pengendalian Pembangunan20. Kasubid Evaluasi & Pelaporan21. Kasubid Litbang Ekonomi22. Kasubid Litbang Sosial Budaya23. Kasubid Litbang Prasarana Wilayah	

Gorontalo, 3 Maret 2021

KEPALA BADAN,


BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19740311 199301 1 001

**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENJA
BAPPEDA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022**

[illegible]



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bappeda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

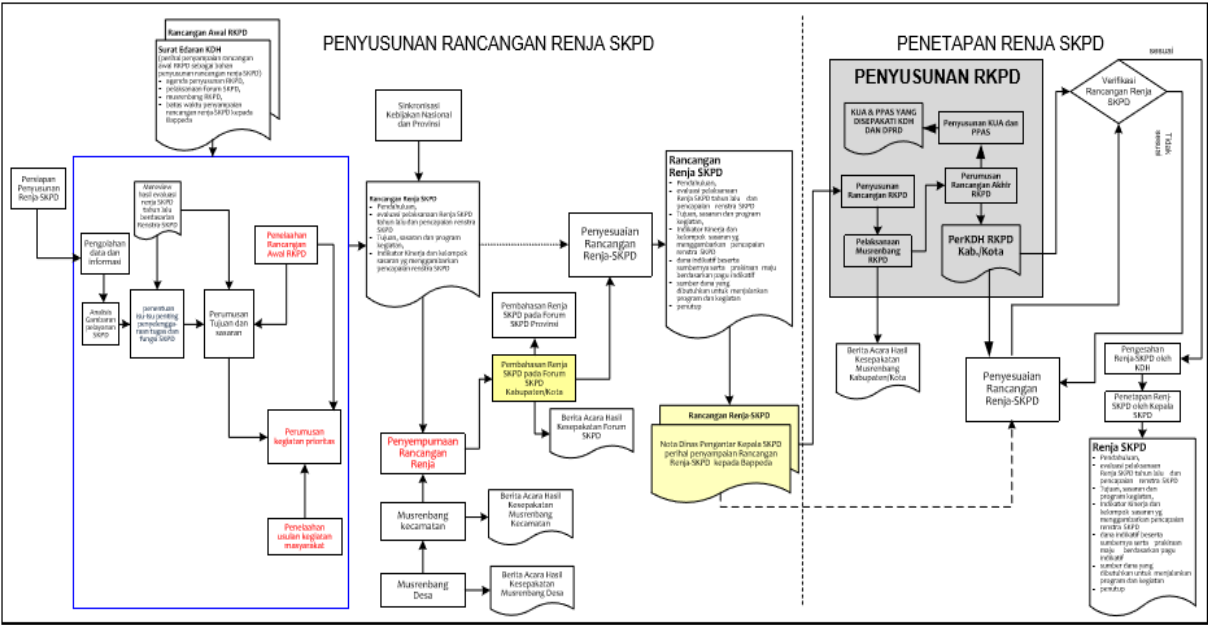
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bappeda Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Bappeda mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo. Rencana Kerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sebagai Perangkat Daerah yang mendukung Pemerintah Provinsi Gorontalo dibidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di berikut ini :



Gambar 1.1. Bagan Alir Rancangan Renja OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah status dicabut, dan diganti dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 status dicabut, dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah status dicabut;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organsiasi Perangkat Daerah status dicabut, dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 telah diganti dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah status dicabut, dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 status dicabut dan, diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan perencanaan selama tahun 2022. Di sisi lain dalam kerangka makro Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 juga untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mensupport Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Periode 2017-2022.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh pimpinan SKPD untuk mengarahkan sekaligus alat kontrol dalam mengendalikan SDM aparatur dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
2. Menyediakan instrumen sebagai alat ukur pencapaian kinerja dalam rangka menilai kinerja organisasi SKPD selama setahun sesuai dengan anggaran yang dialokasikan;
3. Menyediakan instrumen yang akan dijadikan sebagai pedoman setiap SDM aparatur di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program/kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi selama setahun.
4. Menjadikan dokumen sebagai instrumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo dalam waktu 1 (satu) tahun.
5. Menjadikan instrumen sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
6. Menjadikan alat koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas sasaran program/kegiatan lintas Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota serta *stakeholder* di sektor perencanaan pembangunan daerah.
7. Menjadi Renja sebagai alat untuk mengukur tingkat capaian sasaran program/kegiatan SKPD dalam mendukung pencapaian sasaran RENSTRA BAPPPEDA Provinsi Gorontalo dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 serta sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Bappeda yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021

Bab ini menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sub Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional berdasarkan RKP Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target Tahun 2022.

3.3 Program dan Kegiatan

Sub Bab ini memuat program dan kegiatan yang diuraikan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2022

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi Gorontalo khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Bappppeda Tahun 2021. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumber daya manusia dan arahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedangkan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Bappppeda Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Perubahan Bappppeda Tahun 2017-2022, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun $n-2=2020-2=2019$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagaimana terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Bappedda selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, namun disini lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Bappedda Provinsi Gorontalo selaku Institusi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka, antara lain :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Secara lengkap analisis pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bappedda Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Lampiran Tabel T-C.30.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD Dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan SKPD

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo yang disingkat Bappedda dibentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Gorontalo kurun waktu 1 (satu) tahun yang lalu 2020 sebagai institusi/SKPD pembantu Gubernur di bidang Perencanaan Daerah dalam menyiapkan sumber referensi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dengan input yang tersedia telah menghasilkan Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017-2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS tahun 2020 yang keseluruhannya telah dirancang dan tuangkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2020. Hal ini memberikan keluaran bahwa pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo dapat terarah dan terukur setiap tahunnya.

Disamping itu pula Bappeda Provinsi Gorontalo juga telah memfasilitasi program *grant* luar negeri/donor asing yang bertujuan dalam rangka pengembangan kapasitas pembangunan daerah melalui penguatan perencanaan pembangunan daerah. Program *grant* luar negeri/donor asing yang difasilitasi di Provinsi Gorontalo, antara lain :

1. Canadian International Development Agency (CIDA)
2. Australian AID (AUSAID)
3. World Bank
4. Un Women
5. Asosiasi Burung Indonesia

Hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappeda Provinsi Gorontalo adalah yang merupakan kelemahan (*weakness*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, di antaranya adalah :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan koordinasi yang diberikan kepada SKPD terkait dan publik pada umumnya;
2. Kualitas sinergi antara perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi/ monitoring masih kurang;
3. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur/pegawai, baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran;
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui sistem remunerasi yang adil, layak dan kompetitif;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
6. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan Bappeda;

7. Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Bappeda melalui penerapan Teknologi Informasi yang memenuhi Standar;
8. Orientasi pada jabatan struktural, sementara peluang untuk menjadi pejabat fungsional perencana sangat terbuka;

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka RENJA Kementerian yang ditelaah yaitu RENJA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara serta mendukung pencapaian sasaran, visi dan misi Kementerian yakni antara lain visi Kementerian PPN/BAPPENAS 2010-2014 adalah : "Mewujudkan Kementerian PPN/BAPPENAS yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara".

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, perlu tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN / BAPPENAS, adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan Nasional yang berkualitas dalam rangka :
 - a. Mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dengan daerah;
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya, dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;
3. Melakukan koordinasi efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Instrumen koordinasi yang digunakan antara Bappeda Provinsi Gorontalo dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) di tingkat pusat antara lain adalah Forum Rakorbangpus, Forum Bappenas dengan Bappeda seluruh Indonesia dan Musrenbangnas, sedangkan dengan Kabupaten/Kota adalah Forum SKPD, Forum Bappeda dan Musrenbangda Tingkat Kabupaten/Kota dan Musrenbangda Tingkat Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi SKPD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapppeda. Berikut ini beberapa masalah dan hambatan sehingga menjadi kondisi yang berpengaruh terhadap Bapppeda Provinsi Gorontalo.

2.3.2.1. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres, maupun peraturan/keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sistem Manajemen pembangunan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Sistem Perencanaan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan UU Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010-2014.
- b. Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain : PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004;
- c. Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di

- antaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan merupakan bagian dari sistem pelaksanaan;
- d. Sistem pelaporan mengacu UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

2.3.2.2 Sumber Daya Manusia Perencana

Disamping masalah peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan diatas, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pembangunan di Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik serta akuntabel. Dari sisi kuantitas juga, Sumber Daya Manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, Bappeda Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai. Disamping keterbatasan SDM perencana, hal yang sama berlaku untuk SDM Peneliti utamanya yang menguasai IT, sehingga untuk mengatasinya diperlukan kerjasama dengan Lembaga LITBANG, LSM yang berkompeten serta Perguruan Tinggi lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2022, maka dilakukan review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

RPJMD periode tahun 2017-2022 telah disusun, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada tanggal 15 Februari tahun 2017, sehingga RKPD tahun 2021 yang akan menjadi bagian dari periode ketiga RPJMD (2017-2022) akan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025. Periode ketiga dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007-2025, yaitu **Gorontalo Maju Dan Mandiri**. Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (*quality-sustainable growth*).

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa. Untuk itu, sebagai kelanjutan dari periode pembangunan 2012-2017 dan sebagai masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan berikutnya, maka tema pembangunan dalam RKPD 2022 dalam rangka mempersiapkan prioritas pembangunan sebagai pijakan awal untuk memudahkan kepala daerah terpilih dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah, yaitu: "**Meneguhkan Pencapaian Masyarakat yang Maju, Unggul dan Sejahtera**".

Unsur - unsur Tema RKPD 2022 adalah :	
Meneguhkan Pencapaian Masyarakat yang Maju, Unggul dan Sejahtera	<div>a. Pengembangan Infrastruktur yang adaptif terhadap Bencana;</div> <div>b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</div> <div>c. Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pertanian dan Perikanan dan Kelautan;</div> <div>d. Penguatan UMKM dan Pariwisata;</div> <div>e. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;</div> <div>f. Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan;</div> <div>g. Mendorong terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.</div>

Amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 terhadap RKPD tahun 2022 adalah: **1)** mewujudkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan; **2)** mewujudkan sumberdaya manusia yang handal; dan **3)** mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah dalam rangka mewujudkan Visi jangka panjang menjadikan Gorontalo Maju dan Mandiri. Adapun Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 Bappeda Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagaimana terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka perumusan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2022, telah dilaksanakan beberapa kali forum perencanaan yang melibatkan seluruh *stakeholder* di bidang perencanaan pembangunan, baik Kementerian/Lembaga, SKPD Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK, LSM, ORMAS, Perguruan Tinggi, serta masyarakat. Forum-forum perencanaan yang telah dilaksanakan antara lain Focus Group Discussion (FGD) Bidang Perencanaan Tingkat Provinsi Gorontalo, Forum Konsultasi Publik terhadap RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022, Forum SKPD Tingkat Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan Musrenbangda Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022.

Berbagai usulan *stakeholder* yang disampaikan dalam forum perencanaan tersebut telah ditampung, diolah dan disesuaikan nomenklatur program dan kegiatannya, untuk kemudian dituangkan kedalam usulan program dan kegiatan Renja 2022. Hal ini dimaksudkan untuk menyerap masukan, usulan dan aspirasi berbagai *stakeholder* dan masyarakat terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2022 agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan kebutuhan

pembangunan di daerah untuk dapat ditelaah dengan baik, sinkron, sinergi, efektif dan tepat sasaran.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2022 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar dibawah ini :



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut :

PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan

mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;

- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan : (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB;

PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan: (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan: (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) prevalensi obesitas

penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10– 18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;

- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7 : Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan: (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;
- (5) Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo adalah “Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera”, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.** Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. **Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah.** Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastuktur di perkotaan dan perdesaan.
3. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bias terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
4. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.** Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan, dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumber daya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religious serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

5. **Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani.** Menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda Provinsi Gorontalo.

Dengan melihat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, maka Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, antara lain:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan;
2. Perumusan perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
3. Perumuskan kebijakan teknis perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan, melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan Daerah;
4. Mengarahkan perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan Perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedda Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
			KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2017)	2018	2019	2020	2021
1. Mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD. 2. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 3. Memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah. 4. Mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan; 5. Meningkatkan pemanfaatan data/informasi dan hasil kajian dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.	1. Meluasnya penerapan pendekatan HITS dalam perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah;	1. Tingkat keselarasan RENSTRA SKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran;	2. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Membaiknya implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;	3. Tingkat keselarasan KUA PPAS terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pelaporan kinerja pembangunan daerah;	4. Presentase capaian akhir kinerja perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Tersedianya sistem data/ informasi perencanaan pembangunan daerah	5. Jumlah sistem data/informasi perencanaan pembangunan daerah	3	2	2	2	2
	6. Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan;	6. Jumlah hasil kegiatan kelitbangan daerah yang termanfaatkan	5	3	3	3	3

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Provinsi Gorontalo dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappedda. Adapun Program dan Kegiatan Bappedda Provinsi Gorontalo 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

- a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

- c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;

Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

- b. Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- c. Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sub Kegiatan :

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi;
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

b. Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

c. Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

a. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah.

Sub Kegiatan :

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- b. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
Sub Kegiatan :
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial;
 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- c. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Sub Kegiatan :
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
- d. Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Gorontalo

Program Bappeda Provinsi Gorontalo merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Bappeda Provinsi Gorontalo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Bappeda Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
PERENCANAAN		19.966.656.894
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.613.610.699
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.343.258.376
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.087.784.930
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.473.446
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.051.963.192
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.981.966.308
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	69.996.884
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	269.999.233
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	269.999.233
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.837.873.766
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.837.873.766
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.110.516.132
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.110.516.132
II.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.351.917.958
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	620.758.024
	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	620.758.024
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	351.919.716
	- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	351.919.716
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	379.240.218
	- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	174.379.061
	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	204.861.157
III.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.001.128.237
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.694.003.301
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	400.242.635
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	186.338.389
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	120.525.000
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	690.599.559
	-	

No.	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	296.297.718
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.268.119.677
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	410.620.012
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	417.499.654
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	440.000.011
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.039.005.259
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	282.868.890
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	94.432.000
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	137.981.360
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	313.586.009
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	98.392.000
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	111.745.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1.789.019.395
I.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.789.019.395
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah	311.061.367
	- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	311.061.367
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	915.901.546
	- Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	366.412.188
	- Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	503.828.121
	- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	45.661.237
3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	295.350.006
	- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	151.504.490
	- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	84.525.316
	- Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	59.320.200

No.	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	266.706.476
	- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	207.201.374
	- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	59.505.102
Total Pagu BAPPPEDA		21.755.676.289

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiran Maju Tahun 2023 BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, dapat dilihat pada Tabel T-C-33 sebagaimana terlampir.



BAB V PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Bappeda Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2022, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut diatas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Renja Bappeda tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
- b. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
- c. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2022 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham, selanjutnya perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui BinteK, Seminar/Workshop, Diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Renja sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN;
- e. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, dan RENSTRA);
- f. Renja Bappeda Tahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan
- b. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
- c. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- d. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- e. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

- g. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD dan Pencapaian RENSTRA OPD s/d Tahun 2021

SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (RENJA SKPD Tahun n)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1.06	Bidang Perencanaan Pembangunan									
4.03 . 4.03.1 . 01	Program Peningkatan Manajemen Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur								
4.03 . 4.03.1 .01. 01	1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	4 Tahun	80,00
4.03 . 4.03.1 .01. 02	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah unit/)	87 Paket	43 Paket	8 Paket	8 Paket	100,00	14 Paket	65 Paket	74,71
4.03 . 4.03.1 .01. 03	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui diklat/bimtek	300 Orang	50 Orang	100 Orang	100 Orang	100,00	100 Orang	250 Orang	83,33
4.03 . 4.03.1 . 02	Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan								
4.03 . 4.03.1 .02. 01	1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	12 Dokumen	80,00
4.03 . 4.03.1 .02. 02	2. Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	26 Forum / Dokumen	13 Forum / Dokumen	4 Forum / Dokumen	4 Forum / Dokumen	100,00	3 Forum / Dokumen	20 Forum / Dokumen	76,92
4.03 . 4.03.1 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD								
4.03 . 4.03.1 .21. 01	1 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Tahun 2018	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00
4.03 . 4.03.1 .21. 02	2 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Provinsi dan Kab/Kota	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00
4.03 . 4.03.1 .21. 03	3 Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	Pergub 6 RKPD; Perda RPJMD	2 Pergub RKPD	2 1 Pergub RKPD; 1 Perda RPJMD	2 Pergub RKPD; Perda RPJMD	100,00	1 Pergub RKPD	5 Pergub RKPD	83,33

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.1 .21. 04	4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Pertanian dan Pangan	Rapat Lingkup SKPD; 200 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 80 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 40 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 40 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	100,00	Rapat Lingkup SKPD; 40 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 160 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	80,00
4.03 . 4.03.1 .21. 05	5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha dan Industri	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Dunia Usaha dan Industri	Rapat Lingkup SKPD; 115 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 46 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 23 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 23 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	100,00	Rapat Lingkup SKPD; 23 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 92 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	80,00
4.03 . 4.03.1 .21. 06	6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Perikanan dan Pariwisata	Rapat Lingkup SKPD; 120 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 48 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 24 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 24 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	100,00	Rapat Lingkup SKPD; 24 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 96 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	80,00
4.03 . 4.03.1 .21. 07	7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Rapat Lingkup SKPD; 130 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 52 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 26 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 26 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	100,00	Rapat Lingkup SKPD; 26 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 104 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	80,00
4.03 . 4.03.1 .21. 08	8 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental	Rapat Lingkup SKPD; 135 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 54 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 27 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 27 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	100,00	Rapat Lingkup SKPD; 27 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 108 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	80,00
4.03 . 4.03.1 .21. 09	9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan	Rapat Lingkup SKPD; 215 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 86 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 43 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 43 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	100,00	Rapat Lingkup SKPD; 43 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 172 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	80,00
4.03 . 4.03.1 .21. 10	10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Ke-Ciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Prasarana Ke-Ciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Rapat Lingkup SKPD; 230 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 92 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 46 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 46 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	100,00	Rapat Lingkup SKPD; 46 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	Rapat Lingkup SKPD; 184 Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	80,00

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.1 .21. 11	11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air	Jumlah Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air	255 Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi dan Monev Daerah; Koordinasi Pusat;	102 Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi dan Monev Daerah; Koordinasi Pusat;	51 Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi dan Monev Daerah; Koordinasi Pusat;	51 Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi dan Monev Daerah; Koordinasi Pusat;	100,00	51 Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi dan Monev Daerah; Koordinasi Pusat;	204 Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi dan Monev Daerah; Koordinasi Pusat;	80,00
4.03 . 4.03.1 .21. 12	12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan	255 Kegiatan Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	114 Kegiatan Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	45 Kegiatan Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	45 Kegiatan Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	100,00	45 Kegiatan Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	204 Kegiatan Rapat Lingkup SKPD; Koordinasi Daerah; Koordinasi Pusat;	80,00
4.03 . 4.03.1 . 29	Program Pengembangan Riset Daerah	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti								
4.03 . 4.03.1 .29. 01	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Prasarana Wilayah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
4.03 . 4.03.1 .29. 02	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Sosial Budaya	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
4.03 . 4.03.1 .29. 03	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
4.03 . 4.03.1 . 30	Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase Tersusunnya Dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota								
4.03 . 4.03.1 .30. 01	1. Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Data Pembangunan	Jumlah layanan data dan informasi yang tersedia	20 Layanan Data	12 Layanan Data	4 Layanan Data	4 Layanan Data	100,00	4 Layanan Data	20 Layanan Data	100,00

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo

SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2017 (thn n-4)	Tahun 2018 (thn n-3)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
1	Persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
2	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah unit/)	11 Paket	8 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	13 Paket	6 Paket	8 Paket	10 Paket	
3	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek	75 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
4	Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
5	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	1 Forum 3 Dokumen	1 Forum 4 Dokumen	1 Forum 3 Dokumen	1 Forum 3 Dokumen	1 Forum 3 Dokumen	1 Forum 3 Dokumen	1 Forum 4 Dokumen	1 Forum 4 Dokumen	1 Forum 3 Dokumen	1 Forum 3 Dokumen	
6	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
7	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Provinsi dan Kab/Kota	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
8	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD; 1 Perda RPJMD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD; 1 Perda RPJMD	1 Pergub RKPD; 1 Perda RPJMD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	
9	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Pertanian dan Pangan	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	20 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 12 Koordinasi Pusat;	20 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 12 Koordinasi Pusat;	
10	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Dunia Usaha dan Industri	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	12 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	12 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	
11	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Perikanan dan Pariwisata	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	12 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	12 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2017 (thn n-4)	Tahun 2018 (thn n-3)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
12	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	12 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	12 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	
13	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	16 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	
14	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	
15	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Prasarana Ke-Ciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	30 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	
16	Jumlah Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	17 Rapat Lingkup SKPD;28 Koordinasi dan Monev Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	
17	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 6 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	22 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2017 (thn n-4)	Tahun 2018 (thn n-3)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
18	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Prasarana Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
19	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Sosial Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
20	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
21	Jumlah layanan data dan informasi yang tersedia	4 Layanan Data	4 Layanan Data	4 Layanan Data	4 Layanan Data	4 Layanan Data	4 Layanan Data	4 Layanan Data	-	-	-	

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Gorontalo

SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

Kode Rekening	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.755.676.289					21.755.676.289	
5.01	PERENCANAAN				19.966.656.894	PERENCANAAN				19.966.656.894	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, serta Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	14.613.610.699	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, serta Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	14.613.610.699	
5.01.01.1.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	100%	1.343.258.376	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	100%	1.343.258.376	Kegiatan Baru
5.01.01.1.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	1 Forum, 3 Dokumen	1.087.784.930	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Forum, 3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	1 Forum, 3 Dokumen	1.087.784.930	Sub Kegiatan
5.01.01.1.01.07	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	1 Kegiatan	255.473.446	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	1 Kegiatan	255.473.446	Sub Kegiatan
5.01.01.1.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPPPEDA	Persentase Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan serta Ketersediaan Gaji & Tunjangan ASN	100%	10.051.963.192	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPPPEDA	Persentase Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan serta Ketersediaan Gaji & Tunjangan ASN	100%	10.051.963.192	Kegiatan Baru
5.01.01.1.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPPEDA	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BAPPPEDA Provinsi Gorontalo	84 Orang	9.981.966.308	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BAPPPEDA Provinsi Gorontalo	84 Orang	9.981.966.308	Sub Kegiatan
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan b. Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	BAPPPEDA	Jumlah dokumen keuangan bulanan/semesteran tahun berjalan	3 Laporan	69.996.884	Koordinasi dan Penyusunan Laporan b. Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	Jumlah dokumen keuangan bulanan/semesteran tahun berjalan	3 Laporan	69.996.884	Sub Kegiatan
5.01.01.1.05	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui diklat/ bimtek	100%	269.999.233	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui diklat/ bimtek	100%	269.999.233	Kegiatan Baru
5.01.01.1.05.09	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal	100 Orang	269.999.233	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Orang	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal	100 Orang	269.999.233	Sub Kegiatan
5.01.01.1.06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPPPEDA	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah/unit)	10 Paket	1.837.873.766	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPPPEDA	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah/unit)	10 Paket	1.837.873.766	Kegiatan Baru
5.01.01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPPEDA	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Paket	1.837.873.766	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPPEDA	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		1.837.873.766	Sub Kegiatan
5.01.01.1.08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPPEDA	Tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	12 Bulan	1.110.516.132	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPPEDA	Tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	12 Bulan	1.110.516.132	Kegiatan Baru
5.01.01.1.08.03	a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPPEDA	Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.110.516.132	a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPPEDA	Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.110.516.132	Sub Kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100%	1.351.917.958	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100%	1.351.917.958	
5.01.02.1.01	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	1 Pergub RKPD	620.758.024	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	1 Pergub RKPD	620.758.024	Kegiatan Baru
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan Tahunan	1 Pergub	620.758.024	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan Tahunan	1 Pergub	620.758.024	Sub Kegiatan
5.01.02.1.02	2. Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	351.919.716	2. Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	351.919.716	Kegiatan Baru
5.01.02.1.02.01	a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Tersusunnya Dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pembangunan	100%	351.919.716	a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Tersusunnya Dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pembangunan	100%	351.919.716	Sub Kegiatan
5.01.02.1.03	3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	2 Dokumen	379.240.218	3. laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	2 Dokumen	379.240.218	Kegiatan Baru
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan a. dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	174.379.061	Koordinasi Pengendalian Perencanaan a. dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	174.379.061	Sub Kegiatan
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan b. Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Tahun 2020	1 Dokumen	204.861.157	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan b. Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Tahun 2020	1 Dokumen	204.861.157	Sub Kegiatan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100%	4.001.128.237	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100%	4.001.128.237	
5.01.03.1.01	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi Gorontalo	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1.694.003.301	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi Gorontalo	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1.694.003.301	Kegiatan Rutin
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	400.242.635	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	400.242.635	Sub Kegiatan
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pemerintahan	1 Laporan	186.338.389	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pemerintahan	1 Laporan	186.338.389	Sub Kegiatan
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	120.525.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	120.525.000	Sub Kegiatan
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	690.599.559	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	690.599.559	Sub Kegiatan
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	296.297.718	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	296.297.718	Sub Kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang 2. Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi Gorontalo	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	1.268.119.677	Koordinasi Perencanaan Bidang 2. Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi Gorontalo	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	1.268.119.677	Kegiatan Baru
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah a. Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	410.620.012	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah a. Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	410.620.012	Sub Kegiatan
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah b. Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	417.499.654	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah c. Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	417.499.654	Sub Kegiatan
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA c.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	440.000.011	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA d.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	440.000.011	Sub Kegiatan
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi Gorontalo	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	1.039.005.259	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi Gorontalo	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	1.039.005.259	Kegiatan Baru
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) a.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	282.868.890	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) a.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	282.868.890	Sub Kegiatan
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur b.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	1 Berita Acara / OPD	94.432.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur b.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	1 Berita Acara / OPD	94.432.000	Sub Kegiatan
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur c.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Infrastruktur	1 Laporan	137.981.360	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur c.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Infrastruktur	1 Laporan	137.981.360	Sub Kegiatan
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) d.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	313.586.009	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) d.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	313.586.009	Sub Kegiatan
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan e.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	1 Berita Acara / OPD	98.392.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan e.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	1 Berita Acara / OPD	98.392.000	Sub Kegiatan
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan f.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kewilayahan	1 Laporan	111.745.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan f.	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kewilayahan	1 Laporan	111.745.000	Sub Kegiatan
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.789.019.395	Bidang Perencanaan Pembangunan				1.789.019.395	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti		1.789.019.395	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti	100%	1.789.019.395	
5.05.021.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Provinsi Gorontalo	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	311.061.367	Penelitian dan Pengembangan Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Provinsi Gorontalo	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	311.061.367	Kegiatan Baru
5.05.021.01.12	a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	311.061.367	a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	311.061.367	Sub Kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05.021.02	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Provinsi Gorontalo	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	915.901.546	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Provinsi Gorontalo	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	915.901.546	Kegiatan Baru
5.05.021.02.01	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Kajian Aspek Sosial	1 Dokumen	366.412.188	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Kajian Aspek Sosial	1 Dokumen	366.412.188	Sub Kegiatan
5.05.021.02.06	b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan Survey Pemantauan Status Gizi	1 Kegiatan	503.828.121	c. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan Survey Pemantauan Status Gizi	1 Kegiatan	503.828.121	Sub Kegiatan
5.05.021.02.10	c. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Kajian Partisipasi Masyarakat Sekitar Geopark	1 Dokumen	45.661.237	d. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Kajian Partisipasi Masyarakat Sekitar Geopark	1 Dokumen	45.661.237	Sub Kegiatan
5.05.021.03	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Provinsi Gorontalo	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	295.350.006	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Provinsi Gorontalo	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	295.350.006	Kegiatan Baru
5.05.021.03.04	a. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	151.504.490	b. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	151.504.490	Sub Kegiatan
5.05.021.03.07	b. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Rencana Induk Geopark	1 Laporan	84.525.316	c. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Rencana Induk Geopark	1 Laporan	84.525.316	Sub Kegiatan
5.05.021.03.13	c. Penelitian dan Pengembangan komunikasi dan Informatika	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk Teknologi Informasi untuk Pengembangan Geopark Gorontalo	1 Produk	59.320.200	d. Penelitian dan Pengembangan komunikasi dan Informatika	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk Teknologi Informasi untuk Pengembangan Geopark Gorontalo	1 Produk	59.320.200	Sub Kegiatan
5.05.021.04	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Provinsi Gorontalo	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	266.706.476	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Provinsi Gorontalo	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	266.706.476	Kegiatan Baru
5.05.021.04.03	a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi	1 Dokumen	207.201.374	b. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi	1 Dokumen	207.201.374	Sub Kegiatan
5.05.021.04.04	b. Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi	1 Dokumen	59.505.102	c. Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi	1 Dokumen	59.505.102	Sub Kegiatan

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.755.676.289				
5.01	PERENCANAAN				19.966.656.894				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, serta Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	100%	14.613.610.699	APBD	Program Rutin		
5.01.01.1.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	Provinsi Gorontalo	100%	1.343.258.376	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	Provinsi Gorontalo	1 Forum, 3 Dokumen	1.087.784.930	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.01.07	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	255.473.446	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan serta Ketersediaan Gaji & Tunjangan ASN	BAPPPEDA	100%	10.051.963.192	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BAPPPEDA Provinsi Gorontalo	BAPPPEDA	84 Orang	9.981.966.308	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.02.07	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan bulanan/semesteran tahun berjalan	BAPPPEDA	3 Laporan	69.996.884	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.05	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek	Provinsi Gorontalo	100%	269.999.233	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.05.09	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi Gorontalo	100 Orang	269.999.233	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah/unit)	BAPPPEDA	10 Paket	1.837.873.766	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BAPPPEDA	10 Paket	1.837.873.766	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	BAPPPEDA	12 Bulan	1.110.516.132	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.01.1.08.03	a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran	BAPPPEDA	12 Bulan	1.110.516.132	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	Provinsi Gorontalo	100%	1.351.917.958	APBD	Program Rutin		
5.01.02.1.01	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	Provinsi Gorontalo	1 Pergub RKPD	620.758.024	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.02.1.01.06	a. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan Tahunan	Provinsi Gorontalo	1 Pergub	620.758.024	APBD	Sub Kegiatan Rutin		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.02.1.02	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	351.919.716	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.02.1.02.01	a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pembangunan	Provinsi Gorontalo	100%	351.919.716	APBD	Sub Kegiatan Baru		
5.01.02.1.03	3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	Provinsi Gorontalo	2 Dokumen	379.240.218	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.02.1.03.01	a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	174.379.061	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.02.1.03.03	b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Tahun 2021	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	204.861.157	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	Provinsi Gorontalo	100%	4.001.128.237	APBD	Program Rutin		
5.01.03.1.01	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi Gorontalo	100%	1.694.003.301	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.01.01	a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	400.242.635	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.01.03	b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	186.338.389	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.01.04	c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	120.525.000	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.01.05	d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	690.599.559	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.01.07	e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	296.297.718	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.02	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi Gorontalo	100%	1.268.119.677	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.02.01	a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	410.620.012	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.02.05	b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	417.499.654	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.02.08	c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	440.000.011	APBD	Sub Kegiatan Rutin		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.1.03	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi Gorontalo	100%	1.039.005.259	APBD	Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.03.01	a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	282.868.890	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.03.02	b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	Provinsi Gorontalo	1 Berita Acara / OPD	94.432.000	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.03.03	c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Infrastruktur	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	137.981.360	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.03.05	d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	313.586.009	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.03.06	e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	Provinsi Gorontalo	1 Berita Acara / OPD	98.392.000	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.01.03.1.03.07	f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kewilayahan	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	111.745.000	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.789.019.395				
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti	Provinsi Gorontalo	100%	1.789.019.395	APBD	Program Rutin		
5.05.021.01	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Provinsi Gorontalo	100%	311.061.367	APBD	Kegiatan Rutin		
5.05.021.01.12	a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	311.061.367	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.05.021.02	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Provinsi Gorontalo	100%	915.901.546	APBD	Kegiatan Rutin		
5.05.021.02.01	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Jumlah Dokumen Kajian Aspek Sosial	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	366.412.188	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.05.021.02.06	b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Pelaksanaan Survey Pemantauan Status Gizi	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	503.828.121	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.05.021.02.10	c. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kajian Partisipasi Masyarakat Sekitar Geopark	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	45.661.237	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.05.021.03	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Provinsi Gorontalo	100%	295.350.006	APBD	Kegiatan Rutin		
5.05.021.03.04	a. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	151.504.490	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.05.021.03.07	b. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Rencana Induk Geopark	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	84.525.316	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.05.021.03.13	c. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Produk Teknologi Informasi untuk Pengembangan Geopark Gorontalo	Provinsi Gorontalo	1 Produk	59.320.200	APBD	Sub Kegiatan Rutin		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.021.04	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Provinsi Gorontalo	100%	266.706.476	APBD	Kegiatan Rutin		
5.05.021.04.03	a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	207.201.374	APBD	Sub Kegiatan Rutin		
5.05.021.04.04	b. Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	59.505.102	APBD	Sub Kegiatan Rutin		

Formulir E. 29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi : Gorontalo

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	✓				SK No. 32.B Tahun 2021
2	Pengolahan data dan informasi	✓				Telah disajikan pada Bab II
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	✓				Telah disajikan pada Bab II
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	✓		Disajikan Evaluasi namun format evaluasi tidak sesuai dengan format evaluasi T.C-29	Perlu disesuaikan format Evaluasi Renja sesuai Permendagri 86 dalam Format Penyajian Renja Tabel T.C-29	
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	✓				Telah disajikan pada Bab II
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi	✓			Perlu disesuaikan dengan sistematika Permendagri 86 Tahun 2017, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD pada Sub Bab 2.4	

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓				Telah disajikan pada Bab III
8	Penelaahan usulan masyarakat.	✓				Telah disajikan pada Bab II
9	Perumusan kegiatan prioritas		✓			Belum menyebutkan secara spesifik Kegiatan prioritas OPD
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	✓				Telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan berita acara hasil pembahasan
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	✓				Telah menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan Program Kegiatan Hasil
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	✓				Indikator dan target kinerja program kegiatan Daerah telah sesuai dengan tugas fungsi dan urusan yang dibidangi
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓				Sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergi pelaksanaan telah dilaksanakan melalui Forum Gabungan OPD, FGD, Rapat Sinkronsasi, maupun Rapat Tematik lainnya
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	✓				indikatif masing-masing dalam Rancangan Akhir RKPD, mengacu pada hasil output SIPD

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓				Sasaran program kegiatan Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	✓				Program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas pada Forum Perangkat Daerah
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓				Belum mengacu pada dokumen jangka menengah Renstra OPD, karena tahun 2022 merupakan tahun terakhir periodisasi dokumen jangka menengah RPJMD maupun Renstra OPD yang menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Tahunan OPD (Renja)

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah disyahkan		✓		Penetapan Renja dilakukan setelah Penetapan Pergub RKPD	Renja OPD dalam tahap Finalisasi Rancangan Akhir Renja

Gorontalo, Juni 2021

KEPALA BAPPPEDA

Provinsi Gorontalo

BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19740311 199303 1 001